



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp : +62-021-3925230, Fax : +62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

Komnas HAM kembali Turunkan Tim Pemantau Pemilu

Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden akan segera dilaksanakan. Untuk pemilihan di luar negeri bahkan telah dilaksanakan. Berbagai catatan terhadap pelaksanaan terus bermunculan sehingga menimbulkan berbagai dugaan dan kekhawatiran. Kasus dugaan pelanggaran yang terjadi di Selangor Malaysia serta kegaduhan yang terjadi di beberapa negara viral melalui media sosial maupun berita media, bahkan media luar negeri. Tentu saja, secara umum kita tetap optimis penyelenggaraan Pemilu serentak ini akan berjalan lancar serta memenuhi prinsip keadilan, kesetaraan, keterbukaan dan kejujuran. Meski di sisi lain, kekhawatiran akibat berbagai kasus-kasus tadi tetap saja menimbulkan kekhawatiran akan gangguan yang cukup serius pada pelaksanaan dan tentu bisa berakibat kepada menurunnya legitimasi hasil Pemilu.

Di dalam negeri, berdasarkan laporan yang Komnas HAM peroleh dari pemantauan yang diselenggarakan tanggal 18-23 Maret 2019 di wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan; termasuk laporan masyarakat serta analisis data sekunder yang kami lakukan, ada beberapa catatan penting terkait dipenuhinya hak pilih bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai UU dan peraturan yang berlaku; terjaganya kemurnian hasil pemilihan serta mencegah tindakan diskriminasi khususnya bagi warga negara minoritas dan berkebutuhan khusus. Kami menemukan masih banyak warga yang belum terdaftar, terutama karena alasan data kependudukan mereka yang belum direkam maupun karena alasan administrasi lainnya. Kita juga menemukan banyak warga belum didaftar di Lembaga Masyarakat, Rumah Sakit, daerah terpencil, masyarakat adat atau suku asli, penyandang disabilitas termasuk disabilitas mental, padahal mereka memenuhi kriteria kecakapan untuk memilih. Sejalan dengan prinsip hak asasi manusia adalah penting memastikan terpenuhinya hak memilih bagi setiap warga negara tanpa terkecuali, yang memenuhi syarat untuk memilih dengan mengupayakan semaksimal mungkin prosedur yang lebih akomodatif.

Kami juga menemukan masih terjadi penyebaran hoax dan ujaran kebencian serta politisasi agama di dalam pelaksanaan kampanye sehingga mengkhawatirkan menguatkan ketegangan sosial di

antara warga negara. Sayangnya, pengawas Pemilu dan penegak hukum belum sepenuhnya melakukan tindakan pencegahan dan penindakan terhadap para pelaku sebagaimana diatur dalam UU Pemilu Nomor 7/2017 maupun peraturan perundangan lainnya.

Selain itu, Komnas HAM juga menaruh kepedulian yang tinggi terhadap hasil Pemilu diperoleh dengan cara-cara yang jujur dan adil sehingga seluruh proses dan hasil Pemilu memiliki legitimasi yang tinggi di dalam membangun demokrasi Indonesia yang lebih kuat. Jaminan pemurnian hasil Pemilu juga perlu diperhatikan dengan cara memperkecil peluang kecurangan di bilik suara dan pada saat penghitungan suara. Potensi-potensi kecurangan dari sisi mana pun mesti dicegah sedini mungkin termasuk langkah delegitimasi yang mungkin saja dilakukan berbagai pihak. Delegitimasi akan mengurangi kepercayaan akan hasil Pemilu dan akan berdampak kepada penerimaan hasil Pemilu serta dinamika politik setelah Pemilu.

Sejalan dengan tugas dan fungsi Komnas HAM, maka kami kembali ingin memastikan bahwa norma-norma hak asasi manusia dijalankan secara sungguh-sungguh oleh pelaksana Pemilu, termasuk oleh peserta/kontestan Pemilu. Karena itu sejak debat pertama, Komnas HAM selalu memberikan catatan kritis tentang isu hak asasi manusia agar selalu digunakan sebagai standar norma atau perspektif di dalam mendiskusikan setiap kebijakan politik negara. Lebih jauh, menggunakan standar norma hak asasi manusia di dalam berpolitik dan bukan sebaliknya melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia demi mengejar keuntungan politik elektoral. Beberapa isu kampanye politik yang mendiskreditkan hak-hak dari kelompok minoritas tertentu misalnya yang dilakukan terhadap kelompok disabilitas, perempuan dan LGBTI guna memperoleh dukungan politik perlu dihindarkan. Perjuangan demokrasi Indonesia mesti lah didasarkan pada penghormatan setinggi-tingginya nilai-nilai hak asasi manusia dengan memperhatikan prinsip non diskriminasi sebagai komitmen melindungi seluruh warga negara Indonesia.

Dengan mandat yang dimiliki serta keinginan untuk memastikan Pemilu berjalan lancar, absyah dan membawa dampak positif bagi kemajuan bangsa, maka Komnas HAM kembali melakukan pemantauan dari tanggal 15 - 18 April di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Pemilihan daerah ini mempertimbangkan laporan dan perkiraan kerentanan keamanan Pemilu.

Sejalan dengan Seruan Kebangsaan untuk Pemilu Damai yang dikeluarkan Komnas HAM bersama berbagai tokoh nasional tanggal 12 April yang lalu, pemantauan kali ini juga dalam rangka mencegah setiap potensi kecurangan, gangguan yang bisa berakibat kepada konflik sosial politik. Untuk itu, tim pemantau Komnas HAM berkoordinasi dengan berbagai pihak antara lain KPU

nasional dan daerah, Bawaslu nasional dan daerah, Kepolisian, NGO, media massa dan tokoh masyarakat. Secara khusus Ketua Komnas HAM bergabung dengan Election Visit Program (EVP) yang diselenggarakan KPU dari tanggal 15-18 April yang diikuti ratusan wakil-wakil lembaga internasional, duta-duta besar di Jakarta, wakil-wakil Komisi Pemilu negara asing, perguruan tinggi, peneliti dan media massa.

Jakarta, 16 April 2019

Ketua Komnas HAM RI

Ahmad Taufan Damanik